



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 114);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten dalam APBD.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
18. Alokasi Formula adalah alokasi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi berdasarkan variabel tertentu kepada setiap Desa.

BAB II  
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN  
EVALUASI

Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana perimbangan di luar Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaannya yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp91.258.752.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas merata dan adil.
- (4) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan :
  - a Alokasi Dasar; dan
  - b Alokasi Formula.
- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD.
- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa dan jumlah lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot:
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa; dan
  - 5% (lima persen) untuk jumlah lembaga kemasyarakatan Desa;

### Pasal 3

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADDx = ADDDx + ADDFx$$

Keterangan :

ADDx : ADD setiap Desa

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDDx = (\text{Pagu ADD} \times 60\%) / \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDFx = BDx \times (\text{Pagu ADD} \times 40\%)$$

Keterangan :

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

BDx : Bobot Desa setiap Desa

- (4) Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDx = (0,25 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,15 \times V3) + (0,25 \times V4) + (0,5 \times V5)$$

Keterangan :

- BDx : Bobot Desa setiap Desa
- V1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa daerah Kabupaten
- V2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa daerah Kabupaten
- V3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah Kabupaten
- V4 : rasio kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan setiap Desa terhadap kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan daerah Kabupaten
- V5 : rasio jumlah lembaga kemasyarakatan Desa setiap Desa terhadap total jumlah lembaga kemasyarakatan Desa daerah Kabupaten

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas data perhitungan bobot Desa dari DPMD.

#### Pasal 4

- (1) Kertas kerja perhitungan rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) ADD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional BPD;
  - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - e. mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan



- f. sebesar 6% (enam persen) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Pasal 6

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

### BAB III

#### PENYALURAN, PELAPORAN

#### DAN SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan berupa Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diterimanya Dana Perimbangan di RKUD.
- (5) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dana Bagi Hasil di luar Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Dana Alokasi Umum
- (6) Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. ADD yang bersumber Dana Bagi Hasil dilakukan secara triwulanan, dengan ketentuan :

- 1) Triwulan I paling cepat bulan April maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil;
  - 2) Triwulan II paling cepat bulan Juli maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil;
  - 3) Triwulan III paling cepat bulan Oktober maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil; dan
  - 4) Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil yang diterima di Kas Daerah dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- b. ADD yang bersumber Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara bulanan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa yang bersumber Dana Alokasi Umum.
- (7) Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 4), berdasarkan data realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.
  - (8) PPKD melakukan pemotongan penyaluran ADD untuk pembayaran iuran 1% jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap bulan penyaluran.
  - (9) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan besaran tagihan iuran 1% jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa dari BPJS Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (3) Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui PPKD dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
  - b. Pemerintah daerah mendapatkan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.
- (3) Penyaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya dari Pemerintah Pusat telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Bagian Hukum

**BAMBANG WAHYUSUF,SH**  
NIP :19760904 200501 1 010

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN RINCIAN ADD UNTUK SETIAP DESA SE- KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA ( ADD )														KETERANGAN	
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA										BOBOT DESA	JUMLAH	PAGU ADD		
			JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		KETERJANGKAUAN		JML LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA						
			JP	25%	LW	15%	JPM	30%	KT	25%	LKD	5%					
Orang	KJP	KM	KLW	Orang	KPM	KM	KK	Orang	KLKD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4 = 5+7+9+11+1	15 = 14 X (40% X Pagu ADD)	16 = 3 + 15	17	
<b>62.01.01</b>	<b>KECAMATAN KUMAI</b>																
62.01.01.2001	Sungai Cabang	675.990.800,00	936	0,00141	333,00	0,00528	623	0,00629	80,00	0,00363	9	0,00039	0,01701	620.945.500,00	1.296.936.300,00		
62.01.01.2002	Teluk Pulai	675.990.800,00	446	0,00067	478,00	0,00759	139	0,00140	58,00	0,00263	6	0,00026	0,01256	458.372.500,00	1.134.363.300,00		
62.01.01.2003	Sabuai	675.990.800,00	678	0,00102	62,00	0,00098	345	0,00348	80,00	0,00363	12	0,00052	0,00965	352.106.300,00	1.028.097.100,00		
62.01.01.2004	Keraya	675.990.800,00	564	0,00085	78,00	0,00124	221	0,00223	57,00	0,00259	8	0,00035	0,00726	264.916.900,00	940.907.700,00		
62.01.01.2005	Teluk Bogam	675.990.800,00	1.394	0,00211	82,00	0,00130	677	0,00683	54,00	0,00245	11	0,00048	0,01317	480.825.600,00	1.156.816.400,00		
62.01.01.2006	Sungai Bakau	675.990.800,00	1.863	0,00282	111,00	0,00176	407	0,00411	50,00	0,00227	14	0,00061	0,01157	422.200.000,00	1.098.190.800,00		
62.01.01.2007	Kubu	675.990.800,00	4.219	0,00638	122,00	0,00194	1.603	0,01618	27,00	0,00123	13	0,00057	0,02628	959.442.400,00	1.635.433.200,00		
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	675.990.800,00	7.021	0,01061	90,00	0,00143	1.536	0,01550	13,00	0,00059	16	0,00070	0,02883	1.052.421.000,00	1.728.411.800,00		
62.01.01.2009	Batu Belaman	675.990.800,00	3.669	0,00555	73,00	0,00116	956	0,00965	10,00	0,00045	15	0,00066	0,01746	637.397.000,00	1.313.387.800,00		
62.01.01.2010	Sungai Tendang	675.990.800,00	4.178	0,00632	52,00	0,00083	840	0,00848	10,00	0,00045	12	0,00052	0,01660	605.799.600,00	1.281.790.400,00		
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	675.990.800,00	558	0,00084	791,00	0,01255	108	0,00109	34,00	0,00154	6	0,00026	0,01629	594.679.400,00	1.270.670.200,00		
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	675.990.800,00	2.070	0,00313	403,00	0,00640	268	0,00270	21,00	0,00095	12	0,00052	0,01371	500.324.500,00	1.176.315.300,00		
62.01.01.2017	Bumi Harjo	675.990.800,00	5.477	0,00828	27,62	0,00044	1.538	0,01552	19,00	0,00086	24	0,00105	0,02615	954.534.300,00	1.630.525.100,00		
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	675.990.800,00	2.450	0,00370	16,38	0,00026	722	0,00729	23,00	0,00104	19	0,00083	0,01312	479.059.100,00	1.155.049.900,00		
62.01.01.2034	Sabuai Timur	675.990.800,00	322	0,00049	35,00	0,00056	90	0,00091	45,00	0,00204	6	0,00026	0,00426	155.325.500,00	831.316.300,00		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.139.862.000,00</b>	<b>35.845</b>	<b>0,05418</b>	<b>2.754,00</b>	<b>0,04370</b>	<b>10.073</b>	<b>0,10165</b>	<b>581,00</b>	<b>0,02637</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00800</b>	<b>0,23390</b>	<b>8.538.349.600,00</b>	<b>18.678.211.600,00</b>		
<b>62.01.02</b>	<b>KECAMATAN ARUT SELATAN</b>																
62.01.02.2001	Tanjung Putri	675.990.800,00	835	0,00126	19,00	0,00030	291	0,00294	32,00	0,00145	7	0,00031	0,00626	228.462.800,00	904.453.600,00		
62.01.02.2004	Pasir Panjang	675.990.800,00	14.205	0,02147	162,00	0,00257	1.777	0,01793	5,00	0,00023	42	0,00184	0,04404	1.607.520.800,00	2.283.511.600,00		
62.01.02.2010	Rangda	675.990.800,00	1.087	0,00164	51,00	0,00081	74	0,00075	108,00	0,00490	9	0,00039	0,00849	310.077.300,00	986.068.100,00		
62.01.02.2011	Kenambui	675.990.800,00	646	0,00098	320,00	0,00508	162	0,00163	81,00	0,00368	6	0,00026	0,01163	424.463.400,00	1.100.454.200,00		
62.01.02.2012	Runtu	675.990.800,00	1.892	0,00286	504,00	0,00800	115	0,00116	60,00	0,00272	8	0,00035	0,01509	550.882.800,00	1.226.873.600,00		
62.01.02.2013	Umpang	675.990.800,00	1.083	0,00164	609,00	0,00966	309	0,00312	90,00	0,00408	7	0,00031	0,01881	686.642.300,00	1.362.633.100,00		
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	675.990.800,00	2.153	0,00325	19,45	0,00031	266	0,00268	14,00	0,00064	20	0,00087	0,00776	283.154.800,00	959.145.600,00		
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	675.990.800,00	3.850	0,00582	30,00	0,00048	407	0,00411	18,00	0,00082	18	0,00079	0,01201	438.278.700,00	1.114.269.500,00		
62.01.02.2016	Natai Raya	675.990.800,00	2.004	0,00303	6,20	0,00010	186	0,00188	12,00	0,00054	13	0,00057	0,00612	223.306.400,00	899.297.200,00		
62.01.02.2017	Medang Sari	675.990.800,00	1.497	0,00226	9,00	0,00014	506	0,00511	38,00	0,00172	17	0,00074	0,00998	364.293.300,00	1.040.284.100,00		
62.01.02.2018	Natai Baru	675.990.800,00	1.381	0,00209	7,30	0,00012	372	0,00375	17,00	0,00077	14	0,00061	0,00734	267.965.800,00	943.956.600,00		
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	675.990.800,00	1.172	0,00177	12,25	0,00019	523	0,00528	19,00	0,00086	13	0,00057	0,00867	316.644.100,00	992.634.900,00		
62.01.02.2020	Sulung	675.990.800,00	781	0,00118	320,00	0,00508	70	0,00071	80,00	0,00363	8	0,00035	0,01095	399.555.800,00	1.075.546.600,00		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.787.880.400,00</b>	<b>32.586</b>	<b>0,04926</b>	<b>2.069,20</b>	<b>0,03284</b>	<b>5.058</b>	<b>0,05104</b>	<b>574,00</b>	<b>0,02605</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00795</b>	<b>0,16714</b>	<b>6.101.248.300,00</b>	<b>14.889.128.700,00</b>		
<b>62.01.03</b>	<b>KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA</b>																
62.01.03.2001	Babuai Baboti	675.990.800,00	759	0,00115	139,00	0,00221	115	0,00116	114,00	0,00517	7	0,00031	0,00999	364.808.400,00	1.040.799.200,00		
62.01.03.2002	Tempayung	675.990.800,00	842	0,00127	53,00	0,00084	49	0,00049	110,00	0,00499	7	0,00031	0,00791	288.631.000,00	964.621.800,00		
62.01.03.2003	Sakabulin	675.990.800,00	748	0,00113	31,00	0,00049	16	0,00016	99,00	0,00449	7	0,00031	0,00658	240.318.800,00	916.309.600,00		
62.01.03.2004	Kinjil	675.990.800,00	928	0,00140	43,00	0,00068	69	0,00070	96,00	0,00436	7	0,00031	0,00744	271.755.200,00	947.746.000,00		
62.01.03.2005	Dawak	675.990.800,00	829	0,00125	41,00	0,00065	49	0,00049	93,00	0,00422	7	0,00031	0,00693	252.796.200,00	928.787.000,00		
62.01.03.2006	Riam Durian	675.990.800,00	2.439	0,00369	23,45	0,00037	233	0,00235	91,00	0,00413	17	0,00074	0,01128	411.886.500,00	1.087.877.300,00		
62.01.03.2009	Lalang	675.990.800,00	336	0,00051	51,00	0,00081	38	0,00038	78,00	0,00354	5	0,00022	0,00546	199.291.000,00	875.281.800,00		
62.01.03.2010	Rungun	675.990.800,00	1.432	0,00216	71,00	0,00113	262	0,00264	85,00	0,00386	12	0,00052	0,01032	376.632.200,00	1.052.623.000,00		



KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		KETERJANGKAUAN		JML LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA		BOBOT DESA	JUMLAH	PAGU ADD	KETERANGAN	
			JP	25%	LW	15%	JPM	30%	KT	25%	LKD	5%					
			Orang	KJP	KM	KLW	Orang	KPM	KM	KK	Orang	KLKD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4 = 5+7+9+11+1	15 = 14 X (40% X Pagu ADD)	16 = 3 + 15	17	
<b>TOTAL</b>			<b>54.755.254.800,00</b>	<b>165.393</b>	<b>0,25000</b>	<b>9.452,49</b>	<b>0,15000</b>	<b>29.728</b>	<b>0,30000</b>	<b>5.508,00</b>	<b>0,25000</b>	<b>1.144,00</b>	<b>0,05000</b>	<b>1,00000</b>	<b>36.503.497.200,00</b>	<b>91.258.752.000,00</b>	

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Pagu ADD	91.258.752.000,00	
Jumlah Desa	81	
Pagu ADDM = Pagu ADD x 60 %	54.755.251.200,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan
Pagu ADDM Per Desa = Pagu ADDM/Jumlah Desa (Pembulatan)	675.990.800,00	
Pagu ADDP = Pagu ADD x 40%	36.503.500.800,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**ttd**

**BUDI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**  
**UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA ( ADD )			KETERANGAN
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.01</b>	<b>KECAMATAN KUMAI</b>				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	675.990.800,00	620.945.500,00	1.296.936.300,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	675.990.800,00	458.372.500,00	1.134.363.300,00	
62.01.01.2003	Sabuai	675.990.800,00	352.106.300,00	1.028.097.100,00	
62.01.01.2004	Keraya	675.990.800,00	264.916.900,00	940.907.700,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	675.990.800,00	480.825.600,00	1.156.816.400,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	675.990.800,00	422.200.000,00	1.098.190.800,00	
62.01.01.2007	Kubu	675.990.800,00	959.442.400,00	1.635.433.200,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	675.990.800,00	1.052.421.000,00	1.728.411.800,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	675.990.800,00	637.397.000,00	1.313.387.800,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	675.990.800,00	605.799.600,00	1.281.790.400,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	675.990.800,00	594.679.400,00	1.270.670.200,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	675.990.800,00	500.324.500,00	1.176.315.300,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	675.990.800,00	954.534.300,00	1.630.525.100,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	675.990.800,00	479.059.100,00	1.155.049.900,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	675.990.800,00	155.325.500,00	831.316.300,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.139.862.000,00</b>	<b>8.538.349.600,00</b>	<b>18.678.211.600,00</b>	
<b>62.01.02</b>	<b>KECAMATAN ARUT SELATAN</b>				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	675.990.800,00	228.462.800,00	904.453.600,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	675.990.800,00	1.607.520.800,00	2.283.511.600,00	
62.01.02.2010	Rangda	675.990.800,00	310.077.300,00	986.068.100,00	
62.01.02.2011	Kenambui	675.990.800,00	424.463.400,00	1.100.454.200,00	
62.01.02.2012	Runtu	675.990.800,00	550.882.800,00	1.226.873.600,00	
62.01.02.2013	Umpang	675.990.800,00	686.642.300,00	1.362.633.100,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	675.990.800,00	283.154.800,00	959.145.600,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	675.990.800,00	438.278.700,00	1.114.269.500,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	675.990.800,00	223.306.400,00	899.297.200,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	675.990.800,00	364.293.300,00	1.040.284.100,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	675.990.800,00	267.965.800,00	943.956.600,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	675.990.800,00	316.644.100,00	992.634.900,00	
62.01.02.2020	Sulung	675.990.800,00	399.555.800,00	1.075.546.600,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.787.880.400,00</b>	<b>6.101.248.300,00</b>	<b>14.889.128.700,00</b>	
<b>62.01.03</b>	<b>KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA</b>				
62.01.03.2001	Babual Baboti	675.990.800,00	364.808.400,00	1.040.799.200,00	
62.01.03.2002	Tempayung	675.990.800,00	288.631.000,00	964.621.800,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	675.990.800,00	240.318.800,00	916.309.600,00	
62.01.03.2004	Kinjil	675.990.800,00	271.755.200,00	947.746.000,00	
62.01.03.2005	Dawak	675.990.800,00	252.796.200,00	928.787.000,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	675.990.800,00	411.886.500,00	1.087.877.300,00	
62.01.03.2009	Lalang	675.990.800,00	199.291.000,00	875.281.800,00	
62.01.03.2010	Rungun	675.990.800,00	376.632.200,00	1.052.623.000,00	
62.01.03.2011	Kondang	675.990.800,00	301.878.200,00	977.869.000,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	675.990.800,00	304.885.600,00	980.876.400,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	675.990.800,00	295.212.600,00	971.203.400,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	675.990.800,00	276.438.800,00	952.429.600,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	675.990.800,00	315.544.600,00	991.535.400,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	675.990.800,00	356.306.000,00	1.032.296.800,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	675.990.800,00	296.600.200,00	972.591.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.139.862.000,00</b>	<b>4.552.985.300,00</b>	<b>14.692.847.300,00</b>	
<b>62.01.04</b>	<b>KECAMATAN ARUT UTARA</b>				
62.01.04.2001	Nanga Mua	675.990.800,00	457.506.100,00	1.133.496.900,00	
62.01.04.2003	Sukarami	675.990.800,00	328.730.500,00	1.004.721.300,00	
62.01.04.2004	Gandis	675.990.800,00	447.244.300,00	1.123.235.100,00	
62.01.04.2005	Kerabu	675.990.800,00	425.571.700,00	1.101.562.500,00	
62.01.04.2006	Sambi	675.990.800,00	450.172.200,00	1.126.163.000,00	
62.01.04.2007	Penyombean	675.990.800,00	373.885.800,00	1.049.876.600,00	
62.01.04.2008	Pandau	675.990.800,00	519.970.900,00	1.195.961.700,00	
62.01.04.2009	Riam	675.990.800,00	359.027.700,00	1.035.018.500,00	
62.01.04.2010	Panahan	675.990.800,00	585.722.900,00	1.261.713.700,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	675.990.800,00	302.878.100,00	978.868.900,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.759.908.000,00</b>	<b>4.250.710.200,00</b>	<b>11.010.618.200,00</b>	



KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA ( ADD )			KETERANGAN
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.05</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN LADA</b>				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	675.990.800,00	474.409.200,00	1.150.400.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	675.990.800,00	999.383.100,00	1.675.373.900,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	675.990.800,00	603.565.100,00	1.279.555.900,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	675.990.800,00	310.800.200,00	986.791.000,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	675.990.800,00	646.258.300,00	1.322.249.100,00	
62.01.05.2006	Purbasari	675.990.800,00	559.883.900,00	1.235.874.700,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	675.990.800,00	490.062.800,00	1.166.053.600,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	675.990.800,00	420.031.200,00	1.096.022.000,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	675.990.800,00	302.000.200,00	977.991.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	675.990.800,00	464.240.500,00	1.140.231.300,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	675.990.800,00	413.942.600,00	1.089.933.400,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.435.898.800,00</b>	<b>5.684.577.100,00</b>	<b>13.120.475.900,00</b>	
<b>62.01.06</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN BANTENG</b>				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	675.990.800,00	830.132.600,00	1.506.123.400,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	675.990.800,00	321.686.300,00	997.677.100,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	675.990.800,00	728.283.200,00	1.404.274.000,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	675.990.800,00	333.492.900,00	1.009.483.700,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	675.990.800,00	421.521.100,00	1.097.511.900,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	675.990.800,00	357.262.300,00	1.033.253.100,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	675.990.800,00	847.626.900,00	1.523.617.700,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	675.990.800,00	454.291.800,00	1.130.282.600,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	675.990.800,00	356.280.900,00	1.032.271.700,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	675.990.800,00	320.828.400,00	996.819.200,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	675.990.800,00	520.256.100,00	1.196.246.900,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	675.990.800,00	351.925.300,00	1.027.916.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	675.990.800,00	218.837.800,00	894.828.600,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	675.990.800,00	271.144.600,00	947.135.400,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	675.990.800,00	294.984.900,00	970.975.700,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	675.990.800,00	419.726.400,00	1.095.717.200,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	675.990.800,00	327.345.200,00	1.003.336.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.491.843.600,00</b>	<b>7.375.626.700,00</b>	<b>18.867.470.300,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>54.755.254.800,00</b>	<b>36.503.497.200,00</b>	<b>91.258.752.000,00</b>	

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

**BUDI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Bagian Hukum

**BAMBANG WAHYUSUF,SH**  
NIP : 19760904 200501 1 010